

Studi Regional Lanskap Pengembangan Anak Usia Dini

Indonesia

Asia Philanthropy Circle



Centre for
Evidence and
Implementation



Ringkasan Eksekutif

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan PAUD/*ECD* dan memastikan bahwa kebutuhan semua anak terpenuhi melalui berbagai mandat legislatif dan kebijakan. Tantangannya sekarang terletak pada bagaimana memastikan bahwa kebijakan nasional ini dilaksanakan dengan baik melalui program dan penyelenggaraan layanan untuk memenuhi target PAUD/*ECD* yang ambisius.

Sejak tahun 2011, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang meningkat terhadap sektor pengembangan anak usia dini/PAUD (*early childhood development/ECD*). Hal ini terutama terbukti dalam komitmennya terhadap penurunan stunting (pertumbuhan terhambat) dan pengenalan strategi jangka panjang untuk pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Terdapat kebijakan finansial dan strategis yang bertujuan untuk peningkatan sektor pendidikan usia dini, dengan fokus pada meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang menunjukkan komitmen nasional terhadap pengembangan anak usia dini.

Akan tetapi, konteks Indonesia menghadirkan tantangan-tantangan unik untuk reformasi ini. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki landasan kebijakan yang kuat untuk membangun sektor PAUD/*ECD*, tetapi dibutuhkan lebih banyak sumber daya dan kapasitas untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan dan di tingkat lokal memenuhi tujuan ambisius yang tercermin dalam agenda kebijakan nasional.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan negara terpadat keempat di dunia, dengan sebaran geografis yang mencakup kurang lebih 17.500 pulau dan 700 suku yang berbeda yang menggunakan 1.000 bahasa atau dialek yang berbeda, dengan keragaman agama, budaya, dan sejarah yang dimilikinya. Lokasi dan geologi Indo-Pasifik menjadikannya rentan terhadap bencana alam, yang menciptakan tantangan bagi stabilitas infrastruktur dan pembangunan.

Indonesia juga merupakan negara muda dan mengalami urbanisasi secara pesat: dua pertiga penduduknya berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun, dan pada tahun 2030 diperkirakan bahwa proporsi penduduk yang sama akan tinggal di perkotaan. Faktor-faktor ini memperumit penyediaan layanan di seluruh sektor, dan tentunya akan menciptakan rintangan bagi para pembuat kebijakan dan penyedia program yang berusaha dengan cepat mentransformasi peluang hidup bayi dan anak-anak.

Sebanyak 54 program dan 19 kebijakan yang berkaitan dengan PAUD/*ECD* diperiksa untuk penelitian ini. Program-program maupun kebijakan-kebijakan tersebut terwakili dalam masing-masing komponen Kerangka Pengasuhan (*Nurturing Care Framework/NCF*) yang menunjukkan bahwa semua bidang utama PAUD/*ECD* sedang ditangani di negara ini, meskipun ada beberapa kesenjangan – khususnya, program dan kebijakan yang terkait dengan ayah dan kesehatan mental pengasuh. Empat provinsi – yakni, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Papua, dan Kepulauan Riau – diteliti secara lebih rinci untuk memberikan wawasan tambahan tentang kebutuhan spesifik provinsi, penyediaan layanan, dan kesenjangan program. Walau asesmen terhadap empat wilayah geografis ini terbatas ruang lingkupnya, namun dapat membantu untuk mengilustrasikan beberapa realitas ketersediaan dan pelaksanaan layanan di tingkat lokal. Terlihat bahwa sebagian besar provinsi sudah mendapatkan manfaat dari program-program nasional maupun program-program yang dirancang dan diselenggarakan secara khusus ditujukan untuk penduduk setempat.

Akan tetapi, asesmen program dan wawancara dengan pakar-pakar sektor nasional dan provinsi menggarisbawahi bahwa sementara kebijakan di tingkat nasional menunjukkan fokus yang signifikan pada anak usia dini, tantangan utama Indonesia adalah implementasi program di tingkat lokal. Walaupun sudah ada penekanan nasional pada pembelajaran dan perkembangan anak-anak usia dini di Indonesia, pada saat yang bersamaan, terjadi peningkatan desentralisasi pengambilan keputusan dan implementasi program di provinsi, yang jauh dari pemerintah nasional, yang memperumit penyediaan layanan di garis depan.

Penelitian menemukan bahwa tantangan utama dalam implementasi adalah terkait dengan pelimpahan ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Alasan untuk hal ini kompleks, antara lain kapasitas yang tidak memadai di tingkat daerah, tantangan dengan alokasi sumber daya – baik sumber daya manusia maupun anggaran – dan prioritas oleh pemerintah daerah yang tidak selalu menganggap PAUD/*ECD* sebagai salah satu kebutuhan yang paling mendesak. Implementasi semakin diperumit oleh keragaman etnis, bahasa, ekonomi, budaya, agama, dan geografis dari berbagai provinsi dan daerah di negara ini.

Penelitian ini juga menguji semua evaluasi yang tersedia dari 54 program terpilih yang diidentifikasi di Indonesia. Kurang dari setengah (23) dari 54 program yang terpilih di dalam penelitian ini telah dievaluasi sebelumnya dan tersedia untuk diakses oleh publik. Ini adalah temuan positif; di mana berbagai temuan evaluasi merupakan

faktor penting dalam memahami apa yang berhasil, untuk siapa, dan dalam konteks apa.

Dua tema umum utama muncul dari analisis evaluasi program yang dapat menjelaskan tentang area-area potensial untuk tindakan ke depan. Pertama, hanya sedikit evaluasi yang dilakukan untuk implementasi skala besar. Evaluasi, dilakukan secara umum, memeriksa hasil intervensi yang dilaksanakan di lokasi geografis tertentu atau untuk kelompok keluarga atau anak tertentu – bukan kegiatan yang dilaksanakan dalam skala besar. Bahkan jika suatu program efektif di satu lokasi, hasilnya biasanya tidak dapat digeneralisasikan ke semua lokasi atau populasi dimana layanan diberikan. Mengingat konteks yang beragam di Indonesia, evaluasi program di seluruh lokasi layanan dan populasi sangat penting untuk memahami apa yang berhasil, untuk siapa, dan dalam konteks apa. Hal ini membantu para penyedia program untuk memahami komponen-komponen penting dari program dan bagaimana hal ini dapat diimplementasikan secara efektif terlepas dari konteksnya.

Kedua, banyak hasil evaluasi mengungkapkan berbagai hambatan implementasi secara umum atau faktor-faktor yang mungkin telah menghambat efektivitas program. Hambatan-hambatan ini meliputi: kurangnya kapasitas lokal, permasalahan dengan infrastruktur, pemahaman yang tidak konsisten tentang prioritas utama atau arahan pemerintah, jumlah staf terlatih yang kurang memadai dan/atau tingkat pergantian staf yang tinggi, serta kurangnya data yang dapat diandalkan. Kekurangan data meliputi kemampuan dalam pengumpulan data, serta jangkauan geografis data yang dikumpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan sudah ada intervensi di Indonesia yang memiliki potensi dampak akan tetapi gagal karena faktor-faktor yang mungkin dapat diatasi dengan perencanaan dan dukungan implementasi yang tepat sebelumnya. Beberapa dari program yang paling menjanjikan dan efektif yang diidentifikasi memiliki model-model pelaksanaan yang telah disesuaikan konteksnya ke tatanan masyarakat setempat.

Para dermawan, yayasan kelembagaan, dan donor swasta dapat berperan penting dalam menutup kesenjangan di Indonesia. Secara khusus, para donor dapat berkontribusi untuk memajukan PAUD/*ECD* dan memperkuat inisiatif-inisiatif yang ada di Indonesia melalui:

1. **Menskalakan program dan mereplikasi pendekatan:** Para donor dapat mempertimbangkan untuk mengambil program-program dan intervensi-intervensi yang sudah ada dan efektif serta bekerja bersama dengan mitra untuk a) menskalakan program-program ini untuk wilayah-wilayah baru atau populasi sasaran baru, dan/atau b) menerapkan elemen-elemen program yang efektif ke inisiatif-inisiatif baru. Sebagai contoh, sudah ada intervensi yang diidentifikasi dalam pelatihan guru dengan pendekatan pelaksanaan yang akan relevan dalam pelatihan bagi petugas kesehatan masyarakat.

- 2. Mendukung kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya aspek pengasuhan bayi dan anak-anak untuk memungkinkan integrasi ke dalam prioritas kebijakan nasional:** Penelitian mengungkap bahwa kebijakan dan prioritas PAUD/ECD dapat lebih ditingkatkan dengan memperluas ke area-area yang belum terepresentasikan dengan baik di tingkat lokal.

Secara khusus, membangun kesadaran dan penelitian tentang pentingnya kebijakan dan program yang mendukung para ayah dan peran ayah harus menjadi prioritas – Indonesia mirip dengan banyak negara lain dalam memprioritaskan perempuan sebagai pengasuh utama, tetapi telah terbukti bahwa para ayah yang mendukung memiliki dampak positif terhadap partisipasi perempuan di dunia kerja dan pengurangan kekerasan dalam rumah tangga.

Kesehatan mental pengasuh juga diketahui sangat penting untuk perkembangan anak-anak, tetapi di banyak negara, termasuk Indonesia, ini merupakan area yang baru muncul dan belum tercermin dengan baik di dalam kebijakan. Membangun kesadaran dan memfasilitasi pengambil keputusan, akan mendukung komitmen nasional terhadap bidang-bidang ini dan akan membantu menciptakan momentum dan dorongan yang diperlukan bagi program-program tingkat masyarakat untuk memperluas cakupannya.

- 3. Meningkatkan upaya advokasi dengan mitra proyek dan pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengumpulan data dan pemantauan.** Para donor berada dalam posisi unik untuk dapat memberikan dukungan katalitik untuk memungkinkan pengembangan sistem data, keterampilan, dan pendekatan yang dapat memungkinkan tata kelola dan pembuatan kebijakan yang lebih baik bagi bayi dan anak-anak. Data yang lebih baik dan lebih lengkap akan berkontribusi pada pengambilan keputusan berdasarkan bukti tentang di mana dan bagaimana program perlu dilaksanakan, dihentikan, atau diubah untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat dengan lebih baik.
- 4. Berperan aktif dalam koordinasi masyarakat madani.** Penelitian kami mengungkap bahwa terdapat bidang-bidang yang tumpang tindih secara signifikan dalam penyediaan layanan, sebagian karena kurangnya koordinasi antar para pelaku di sektor bersangkutan. Wawancara pakar juga berfokus pada perlunya menyatukan pemangku kepentingan utama untuk memastikan bahwa upaya-upaya tidak terduplikasi secara tidak perlu, yang menyisakan segmen-segmen tertentu dari populasi atau wilayah-wilayah negara yang belum terkena program atau intervensi.
- 5. Memberikan bantuan teknis yang tepat sasaran kepada pemerintah daerah.** Para donor dapat bekerja secara fleksibel dengan pemerintah daerah untuk memastikan apa kebutuhan mereka yang paling mendesak, dan mendukung kebutuhan tersebut melalui alokasi dan penyediaan sumber daya, dukungan dalam perencanaan dan desain program, dan mendukung pengembangan kebijakan dan peraturan yang memungkinkan terlaksananya program tersebut.